PERBANDINGAN PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA DAN SAYYID QUTB TENTANG PENERAPAN SYARI'AT ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)

Oleh :

ROFIATUL ANA
NIM. AO.22.05.009

PEMBIMBING :

Drs. H. IMAM GHAZALI SAID, MA

FAKULTAS ADAB
JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Rofiatul Ana
NIM	: A02205009
Jurusan	: Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas	: Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya sendiri bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 16 Juli 2009
Saya yang menyatakan,

ROFIATUL ANA
NIM. A02205009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh **Rofiatul Ana (AO2205009)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 16 Juli 2009

Pembimbing,

Drs. H. Imam Ghazali Said, MA

NIP. 150 242 675

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan lulus
pada tanggal 29 Juli 2009

Ketua/Pembimbing	: Drs. H. Imam Ghozali Said, MA.	(.....)
Penguji I	: Drs. H. Abdul Jalil, M.Pd.	(.....)
Penguji II	: Drs. H.M. Ridwan, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dwi Susanto, M.Hum.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab
IAIN Sunan Ampel Surabaya

Drs. H. Misbahul Munir, M.Ag.
NIP. 150 234 692

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perbandingan Pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb Tentang Penerapan Syari'at Islam". Permasalahan yang diteliti di sini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

1. Bagaimana tinjauan politik Islam untuk penerapan syari'at Islam secara umum?
2. Bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syari'at Islam?
3. Adakah sisi persamaan dan perbedaan antara pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syari'at Islam?

Berkenaan dengan itu, maka penelitian kepustakaan (*library research*) ini menggunakan pendekatan historis dan politik, yang bertujuan untuk memberikan pandangan secara jelas tentang penerapan syari'at Islam yang digagas oleh Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb mempunyai substansi dan agenda akhir yang sama, yakni menegakkan politik Islam, di mana syariat Islam harus dijadikan sebagai konstitusi (UUD) negara. Apa pun bentuk negaranya, baik republik atau kerajaan, yang penting negara dapat menjalankan syari'at Islam dengan sempurna. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan itu, mereka mempunyai strategi dan cara sendiri-sendiri. Hasan Al-Banna cenderung bersikap moderat, dengan tidak menyatakan sikapnya secara langsung dengan pemerintahan yang ada. Dengan demikian, Al-Banna ikut mencalonkan diri untuk menjadi anggota parlemen dalam pemilu tahun 1942 di Mesir, dengan tujuan ingin menyebarkan dakwah. Sedangkan Sayyid Qutb cenderung bersikap radikal, pro-kekerasan dengan senang dan percaya pada tindakan langsung melawan pemerintah yang ada. Karena itu, ia tak pernah ikut mencalonkan diri dalam pemilu yang pernah terjadi di Mesir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This paper is titled "Comparative on Hasan Al-Banna and Sayyid Qutb Thought on Realization Islamic Shari'a". The questions researched can be classified in Egypt three parts namely.

1. How is purpose Islamic politic for realization of Islamic shari'a perspective generally?
2. How are Hasan Al-Banna and Sayyid Qutb thought on realization of Islamic shari'a?
3. Are there similarities and dissimilarities between Hasan Al-Banna and Sayyid Qutb thought on realization of Islamic shari'a?

Related to the questions, in this library research writer uses historical and political approaches that aim for describing clearly the Hasan Al-Banna and Sayyid Qutb thought on realization Islamic shari'a.

The conclusions of this research are that Hasan Al-Banna and Sayyid Qutb thought on realization the Islamic shari'a have the similar final agenda substantively, namely to stand Islamic politic where the Islamic shari'a is made as constitution of state. Whatever the form of state is, such as republic or monarchy state, the most important thing is that the shari'a must be applied completely. But to get the purpose they both had different strategies and methods. Hasan Al-Banna tended to attitude moderately by no to proclaim his attitude to the government. So that, Banna take a part to candidate of parliament member in elections on 1942 in Egypt in which his purpose is for religious proselytizing. While Sayyid Qutb tended to attitude radically and like and believe to spontaneous actions against government. There for he never took a part in elections in Egypt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS
No. REG : A-2009/SPI/040
ASAL BUKU :
TANGGAL :

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
PEDOMAN TRANSLITERASI v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Pendekatan Dan Kerangka Teori 8
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Metode Penelitian 12
H. Sistematika Bahasan 14

BAB II TINJAUAN POLITIK ISLAM UNTUK PENERAPAN SYARI'AT ISLAM 16

A Pengertian Politik Islam Untuk Penerapan Syari'at Islam Secara Umum 16
B. Dasar-dasar Politik Islam Dalam Penerapan Syari'at Islam 19
C. Biografi Hasan Al-Banna 28
1. Riwayat Hidup 28
2. Karya-karyanya 33
D. Biografi Sayyid Qutb 34
1. Riwayat Hidup 34
2. Karya-karyanya 37

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA DAN SAYYID QUTB TENTANG PENERAPAN SYARI'AT ISLAM 39

A. Penerapan Syari'at Islam Dalam Pandangan Hasan Al-Banna 39

B. Penerapan Syari'at Islam Dalam Pandangan Sayyid Qutb 43

C. Persamaan Dan Perbedaan Antara Penerapan Syari'at Islam Hasan Al-Banna Dan Sayyid Qutb 51

D. Pengaruh Pemikiran Hasan Al-Banna Dan Sayyid Qutb Terhadap Dunia Islam 52

BAB IV PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA DAN SAYYID QUTB TENTANG PENERAPAN SYARI'AT ISLAM 54

A. Penerapan Syari'at Islam Dalam Pandangan Hasan Al-Banna 54

B. Penerapan Syari'at Islam Dalam Pandangan Sayyid Qutb 56

C. Persamaan Dan Perbedaan Antara Banna Dan Qutb Tentang Penerapan Syari'at Islam 60

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran-saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan dalam masyarakat, membahas soal-soal yang berkenaan dengan masalah, bagaimana sebuah pemerintah dijalankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar terwujud masyarakat atau negara yang paling baik. Dengan demikian, politik itu mengandung berbagai unsur-unsur aktivitas pemerintah, masyarakat, dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan dalam negara.[1] Politik pada umumnya merupakan bagian yang sangat penting, di mana manusia mendambakan suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih kondusif bagi peningkatan martabat dan hak-hak asasi manusia. Ini, tentunya ada pada setiap negara. Suatu kewajaran apabila antara negara yang satu dengan negara yang lain mempunyai tujuan yang berbeda. Karena setiap komunitas, apalagi komunitas besar pasti mempunyai pemikiran dan tujuan yang tidak sama.

Secara teori, politik Islam merupakan suatu kegiatan politik yang sangat terkait dengan landasan, dimensi-dimensi dan nilai-nilai yang berdasarkan pada ajaran dan syari'at Islam. Artinya hubungan manusia dengan kekuasaan atau berbagai kepentingan manusia yang diilham dengan petunjuk-petunjuk Islam

---

[1] Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qu'ran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersumber pada Al-Qur'an.[2] Karena pada prinsipnya Islam adalah agama yang tujuan utamanya menegakkan dan membangkitkan kembali faham tauhid dengan segala kemurnian yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah.[3]

Sistem yang berlaku di Mesir waktu di bawah raja Faruk, menganut sistem monarchi atau kerajaan. Dalam sistem ini, kepala negara ditentukan melalui garis keturunan tanpa musyawarah. Hasan Al-Banna menyatakan bahwa awal penyakit masyarakat adalah adanya penyimpangan umat dari cita-cita Islam semula yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Islam, hanya mengakui kepemimpinan umat yang didasarkan pada *bay'ah* dan *syura*, dan Islam tidak mengakui kepemimpinan yang didasarkan melalui garis keturunan.[4] Hasan Al-Banna sangat prihatin, setelah melihat akibat negatif pengaruh modernisasi sekuler Barat pada kehidupan dan nilai-nilai Islam serta kelemahan pemerintah yang dirasa kurang tanggap dalam menghadapi kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat Mesir.

Dominasi Barat terhadap negara-negara Islam tidak dalam kapasitasnya yang saling kerja sama, akan tetapi selalu memojokkan dan memusuhi umat Islam. Sehingga ditegaskannya sifat politik Islam dan perlunya aksi politik, guna melaksanakan dan mendirikan pemerintahan Islami dengan mempunyai keyakinan pada syari'at Islam yang utuh.[5]

---

[2] Abdul Aziz, *Politik Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 17.
[3] Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Pensil, 2004), 56.
[4] Hasan Hanafi, *Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: Islamika,2003), 134.
[5] John L. Esposito, *Dinamika Kebangunan Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat kondisi Mesir seperti itu, Hasan Al-Banna ingin menegakkan dan menerapkan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, Hasan Al-Banna tidak mempunyai niat untuk melakukan kudeta dengan merubah bentuk pemerintahan yang ada, ia hanya ingin menjadikan syari'at Islam menjadi hukum dalam negara. Untuk mencapai tujuannya, pemilu tahun 1942 menjadi awal peluang Hasan Al-Banna untuk ikut mencalonkan diri agar menjadi anggota parlemen. Keikutsertaan Hasan Al-Banna dalam pemiliu kali ini merupakan jawaban atas kebutuhan praktis, demi kepentingan dakwah.[6] Sayyid Qutb juga tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang berlaku, Ketika itu Mesir dipimpin oleh presiden Jamal Abdul Naser. Dalam pandangan Qutb Sistem yang berlaku pada pemerintahan masa itu berseberangan dengan ajaran dan syari'at Islam yang sebenarnya, Sehingga Qutb meletakkan ide-ide berupa keinginan untuk menerapkan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan ia ingin menjadikan syari'at Islam menjadi konstitusi (UUD) negara. Akan tetapi untuk menerapkan idenya itu, Sayyid Qutb tidak pernah ikut pemilu yang pernah ada di Mesir. [7]

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya munculnya pemikiran tentang penerapan syari'at Islam disebabkan adanya kemunduran dan kerapuhan dunia Islam dan adanya rongrongan Barat terhadap keutuhan

---

[6] Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna* (Jakarta: Harakah, 2002), 42.
[7] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan politik. Sehingga wilayah dunia Islam berakhir dengan dominasi kebudayaan dan penjajahan Barat.

Pada dasarnya pemikiran tentang penerapan syari'at Islam yang digagas oleh Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb, tidak terlepas dengan adanya organisasi IM (Ikhwanul Muslimin) yang didirikan tahun 1928. Adanya Ikhwanul Muslimin merupakan respon terhadap perkembangan yang terjadi di dunia Islam khususnya Timur Tengah dengan makin luasnya dominasi imperialisme Barat.[8] Organisasi ini didirikan dan dikembangkan oleh dua tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangannya. Dengan demikian Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb menjadi penggerak Ikhwanul Muslimin di bidang pembaharuan, dengan tujuan utamanya untuk melakukan perubahan radikal dari sistem sosial-politik yang sekuler ke arah ketentuan-ketentuan Islam yang lebih baik.

Lahirnya gerakan radikal ini adalah sebagai respon untuk melawan Barat yang hegemonic dan terlalu ikut campur terhadap negara-negara Islam. Sehingga dengan cara apapun mereka mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat.[9]

Hasan Al-Banna adalah pendiri Ikhwanul Muslimin yang dilahirkan di Distrik Mahmudiyah, Mesirpada 17 oktober 1906 bertepatan dengan tahun 1323 H.[10] Ayahnya bernama Ahmad Abdurrahman Banna, seorang guru fiqh, Tauhid, dan Nahwu. Jadi Hasan Al-Banna dibesarkan di tengah keluarga yang terkenal dengan keilmuan dan keluarga yang religius yang sudah tersentuh oleh faham

---

[8] Endang Turmudi, dkk, *Islam dan Radikalisme* Di Indonesia (Jakarta: LIPI PRESS, 2005), 56.
[9] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta: ERLANGGA, 2005), 13.
[10] Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembaharuan.[11] Ayahnya selalu memberi motivasi untuk menghafalkan Al-Qur'an, sehingga di usia 14 tahun al- Banna berhasil menghafal isi Al-Qur'an. Di usia 16 tahun ia melanjutkan studi ke perguruan tinggi Dar Al-Ulum, di Kairo. Ketika menginjak usia 21 tahun ia menamatkan studinya di Dar Al-Ulum dan ditunjuk menjadi guru di Isma'iliyah. Menurut Hasan Al-Banna, Islam adalah dakwah yang meliputi segala segi kehidupan. Di mana ajaran-ajaran Islam tidak hanya berkenaan dengan ibadat ritual saja. Akan tetapi, Islam juga menyangkut kehidupan publik umat Islam.[12]

Sayyid Qutb, nama lengkapnya adalah Sayyid bin Qutb bin Ibrahim lahir di Musyah, provinsi Asiyuth, Mesir pada 9 oktober 1906. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menitikberatkan pada ajaran Islam dan mencintai Al-Qur'an. Sebelum umur 10 tahun, ia menyandang gelar al-hafidz. Kemudian tahun 1929 Sayyid Qutb memperoleh kesempatan masuk dalam *Tajhiziah* (sekolah persiapan) Dar Al-Ulum (sekarang masuk bagian dari Universitas Kairo), khusus untuk kajian ilmu Islam dan Sastra Arab. Ia lulus pada tahun 1933. pemikirannya terfokus pada tema tauhid yang murni untuk menyerukan kebangkitan Islam dengan kehidupan yang Islam secara total. [13]

Pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syari'at Islam ini punya sisi persamaan dan perbedaan. Adakalanya Hasan Al-Banna lebih

---

[11] Imam Ghazali Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis* (Surabaya: DIANTAMA,2003), 152-153.

[12] Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Pada Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 202.

[13] Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak meletakkan dasar-dasar dakwah, Sementara dakwah yang dilakukannya adalah dakwah berupa pendidikan , penyadaran, dan keteladanan. Gerakan Hasan Al-Banna lebih moderat, sehingga tidak pernah melawan atau menyatakan sikapnya secara terbuka terhadap kekerasan atau terorisme berdarah yang terjadi.[14]

Fondasi pandangan yang dijadikan patokan oleh Hasan Al-Banna adalah aqidah. Berangkat dari fondasi ini ia menekankan pemikirannya tentang urgensitas peran agama di dalam proses perubahan dan penentuan bidang serta sarana-sarana perubahan yang pokok dalam sebuah negara. Menurut Al-Banna, sesungguhnya perubahan sosial dan perbaikan harus dimulai dari dalam diri sesorang. Al-Banna memberikan argumentasinya sesuai firman Allah SWT yang artinya: "sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (QS. Al- Ra'd: 11). Setelah melakukan perubahan dalam diri, maka selanjutnya ia harus melakukannya pada tingkat keluarga, kemudian masyarakat sekelilingnya.[15] Inilah tahapan-tahapan yang digagas Banna dalam mewujudkan sistem yang Islami.

Sayyid Qutb mengemukakan konsep yang relatif lengkap dan utuh dari sisi filosofi, ideologi hingga metode perjuangan. Sayyid Qutb juga disebut sebagai orang yang menyempurnakan bangunan dasar, perpanjangan, serta

---

[14] Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, 36.
[15] Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna*, 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan dari pemikiran yang diletakkan oleh Al-Banna. Akan tetapi, Sayyid Qutb menganut garis revolusioner dan cenderung tidak sabar untuk menerapkan metode pentahapan yang dilakukan Al-Banna. Sayyid Qutb mengembangkan pemikirannya yang ditarik ke kutub ekstrim, pro-kekerasan, eksklusif, dan lebih senang menyatakan sikapnya secara langsung dan terbuka terhadap pemerintahan. Bahkan ketika itu ia ditengarai punya niat untuk mengganti sistem yang berlaku pada pemerintahan yang ada, sehingga banyak metode gerakannya yang berseberangan dengan Al-Banna.

Pemikiran politik Sayyid Qutb lebih banyak berkisar pada upaya untuk mengetengahkan sistem dan tatanan Islami sebagai alternatif ideologi. Bahkan Sayyid Qutb menawarkan bahwa Islam sebagai alternatif dari komunisme, kapitalisme, liberalisme, dan sekularisme yang disebut sebagai sistem jahiliah.[16] Namun perlu di garis bawahi, bahwa substansi pemikiran dan agenda akhir dari dua tokoh ini tetap sama yakni mengidealkan dan mewujudkan syari'at Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat maupun negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan politik Islam untuk penerapan syari'at Islam secara umum?
2. Bagaimana pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syariat Islam?

---

[16] Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adakah sisi persamaan dan perbedaan antara pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dirumuskan dalam permasalahan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengugkapkan secara jelas tentang tinjauan politik Islam dalam penerapan syari'at Islam secara umum.
2. Mengetahui lebih dalam tentang penerapan syariat Islam yang dicetuskan oleh Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb.
3. Mengetahui sisi-sisi persamaan dan perbedaan antara pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syariat Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya peenelitian ini diharapkan dapat memberikan guna dan manfaat:

1. Secara teoritis, dapat menimbulkan kembali minat untuk melakukan penelitian lebih jauh untuk membangun "teori politik Islam", terutama tentang penerapan syari'at Islam yang digagas oleh Hasan Al- Banna dan Sayyid Qutb.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat menjadi bahan referensi bagi kelengkapan studi tentang pemikiran politik Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pendekatan Dan Kerangka Teori

Pengertian politik dalam skripsi ini adalah suatu yang mencakup aneka ragam kegiatan dalam sistem masyarakat yang terorganisasikan, terutama berkaitan dengan negara yang menyangkut kekuasaan, pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem maupun mengenai pelaksanaannya.[17] Sedangkan Islam di sini berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, dalam arti sebagai ketundukan dan kepatuhan kepada ajaran yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pegangan hidup bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.[18]

Maka pendekatan historis yang layak digunakan, dan ditunjang pendekatan ilmu politik. Pendekatan historis ini digunakan untuk mengungkap bagaimana dinamika pemikiran Hasan Al- Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syariat Islam. Sedangkan pendekatan ilmu politik, karena pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb mencakup masalah bagaimana hukum Islam ditegakkan dalam negara, struktur kekuasaan, kepemimpinan, hierarki sosial, dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, maka teori yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah teori politik *valuational* dari buku ilmu politik kontemporer karangan Eddi Wibowo. Teori *valuational* ini menjelaskan bahwa penerapan syariat Islam yang digagas oleh Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb mendasarkan konsepnya

---

[17] B.N. Marbur, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 519.
[18] Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: CV Anda Utama, 1992), 477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada nilai-nilai ideal berupa moral Islam serta bertujuan merumuskan norma-norma politik (*norm for political behavior*), dimana norma-norma yang dijadikan patokan dalam politik Islam merujuk pada ajaran dan syari'at Islam. Sehingga norma dan nilai-nilai Islam ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan politik di sebuah negara.[19] Teori politik semacam ini mencoba untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memberi kepuasan pada perseorangan, dan di lain pihak dapat membimbingnya untuk menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil dan dinamis.

F. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah:

1. Skripsi: Ahmad Taufiq, mahasiswa fakultas Adab jurusan SPI (sejarah peradaban Islam), 1989, "Peranan Hasan Al-Banna Dalam Ikhwanul Muslimin". Skripsi ini menjelaskan bahwa situasi Mesir menjelang lahirnya Ikhwanul Muslimin sangat jauh dari citra syari'at Islam yang sebenarnya. Hal inilah yang mengantarkan kepribadian Hasan Al-Banna. Bersamaan dengan kondisi yang terjadi ini, maka bersemi dan berkembanglah prinsip aqidah

[19] Eddi Wibowo, *Ilmu Politik Kontemporer* (Yogyakarta: YPPI, 2004), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kuat dalam dirinya. Inilah diantaranya yang mendorong lahirnya Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan pembaharuan. Al-Banna adalah pendiri gerakan ini yang sungguh benar-benar memiliki pokok jihad yang utuh. Jadi skripsi memfokuskan pembahasan pada kiprah Hasan Al-Banna dalam Ikhwanul Muslimin.

2. Skripsi: Ely Lailana, mahasiswa fakultas Adab, jurusna SPI (Sejarah Peradaban Islam), 1995, "Sayyid Qutb Studi Tentang Pemikirannya Dalam Bidang Keadilan Sosial". Skripsi ini menjelaskan bahwa keadilan sosial yang merupakan keseimbangan, kesejahteraan dalam aspek ekonomi itu sangat erat kaitannya dengan sebuah prinsip bahwa kesejahteraan yang dimaksud bukan merupakan alat yang penting agar manusia berhasil mencapai kesejahteraan yang hakiki. Statement ini sebagai indikator dari konsep Islam yang koheren dan komprehensif tentang Tuhan, alam, kehidupan dan manusia. Jadi skripsi fokus pada pembahasan keadilan sosial yang hubungannya sangat menyeluruh antara alam semesta, manusia, dan sang pencipta.
3. Buku: Fathi Yakan, "Revolusi Hasan Al-Banna" (Jakarta: Harakah, 2002). Buku ini menjelaskan bahwa revolusi yang dimaksud di sini adalah perubahan sistem kemasyarakatan secara total menjadi sistem yang Islami yang menjadi agenda yang hendak ditegakkan oleh Hasan Al-Banna. Dalam buku ditemukan sebuah warna baru revolusi yang hendak dibangun Hasan Al-Banna lewat Ikhwanul Muslimin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelusuran awal penulis sampai saat ini belum ada penelitian atau tulisan dalam bentuk skripsi yang sejenis dengan topik peneliti. Sehingga peneliti masih tetap membahas "perbandingan pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syariat Islam". Meskipun ada buku sejenis yang membahas masalah ini, akan tetapi peneliti tetap menelusuri beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb khususnya yang berkaitan dengan syari'at Islam.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah

1. Heuristik, yaitu cara mengumpulkan data dari sumbernya yang ada hubungan dengan topik penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan penggalian data dengan menggunakan *library research* (study pustaka). Artinya penulis di sini menggunakan dua jenis data, yaitu dta primer dan skunder.[20]

   Sumber primer, yaitu sumber yang langsung berasal dari orangnya sendiri atau terdiri dari literatur yang bersifat deskriptif tentang Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb. antara lain: *Revolusi Hasan Al-Banna* (Fathi Yakan), *Cahaya Dari Balik Kabut* (Hasan Al-Banna), *Majmuatur Rasail* (Hasan Al-Banna), *Fiqh Dakwah* (Sayyid Qutb), *Mengapa Saya Di Hukum Mati* (Sayyid Qutb),*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Sayyid Qutb), *Islam dan Perdamaian* Dunia (Sayyid Qutb).

[20] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2007), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber skunder, yaitu sumber yang berasal dari orang lain yang meneliti atau merupakan literatur pendukung penelitian. Antara lain: *Islam dan Tata Negara* (Munawir Sjadzali), *Arus Baru Islam Radikal* (M Imdadun Rahmat), *Dinamika Kebangunan Islam*, (John L Esposito), *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Pada Abad 20* (Herry Mohammad), *Pemikiran Politik Islam* (Zainuddin), *Politik Islam Politik* (Abdul Aziz), *Fundamentalisme Islam* (Hasan Hanafi), *Islam dan Radikalisme Islam Di Indonesia* (Endang Turmudi), *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Ali Rahmena), *Ilmu Politik Kontemporer* (Eddi Wibowo), dll.

2. Setelah terkumpulnya sumber atau data primer dan skunder yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya kritik. Tahap ini dimulai dari mengkritisi, mengedit data, dan melihat kembali kelengkapan data dan diselingi dengan reduksi data berupa penambahan atau pengurangan apabila diperlukan. Sehingga tercapailah pemilihan data yang rapi dan jelas. Dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber melalui kritik ekstern dan keabsahan kesahihan sumber melalui kritik intern.[21] Akan tetapi menurut peneliti di sini, bahwasannya sumber-sumber yang diperoleh baik keaslian sumber atau kesahihan sumber dianggap sudah valid. Karena dari berbagai sumber yang diperoleh semua menyebutkan hasil yang sama. Di sini peneliti sangat mendukung adanya data-data yang ada, baik berasal dari sumber primer maupun skunder.

---

[21] Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kemudian interpretasi (penafsiran). Di sini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis secara induktif. Deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analisis berarti menguraikan suatu peristiwa yang terjadi untuk mengetahui yang sebenarnya. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah.[22] Komparasi keduanya diharapkan dapat membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.
4. Historiografi (penulisan sejarah), merupakan tahap yang terakhir. Di sini penulis memaparkan dan melaporkan hasil penelitian berupa skripsi. Artinya menyampaikan data-data yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah (aspek kronologis) yang dipaparkan secara sistematis dan terperinci dengan menggunakan bahasa yang benar. Sehingga penyajiannya akan disusun sedemikian rupa sesuai dengan tema dan sistematika pembahasan.

H. Sistematika Bahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka penulis menyususn sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, merupakan landasan awal penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

---

[22] Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : Tinjauan politik Islam untuk penerapan syari'at Islam dan biografi, pembahasan meliputi: pengertian politik Islam untuk penerapan syari'at Islam secara umum, dasar-dasar politik Islam untuk penerapan syari'at Islam, biografi Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb, yang terdiri dari riwayat hidup dan karya-karyanya.

BAB III : Pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syari'at Islam, pembahasan ini meliputi: penerapan syariat Islam dalam pandangan Hasan Al-Banna, penerapan syariat Islam dalam pandangan Sayyid Qutb, persamaan dan perbedaan antara penerapan syariat Islam Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb, dan yang terakhir pengaruh pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb terhadap dunia Islam.

BAB IV : Pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb tentang penerapan syari'at Islam, meliputi: penerapan syariat Islam dalam pandangan Hasan Al- Banna, penerapan syariat Islam dalam pandangan Sayyid Qutb, persamaan dan perbedaan antara Banna dan Qutb tentang penerapan syari'at Islam.

BABV : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan sebagai jawaban fokus kajian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dan Berisi saran-saran konstruktif yang berkaitan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN POLITIK ISLAM UNTUK PENERAPAN SYARI'AT ISLAM

A. Pengertian Politik Islam untuk penerapan syari'at Islam Secara Umum

Sebelum menjelaskan tentang pengertian politik Islam, maka terlebih dahulu akan dijelaskan secara umum mengenai politik dan Islam sendiri, serta bagaimana hubungan antara keduanya. Pada dasarnya pengertian politik itu banyak pendapat yang mengemukakan secara berbeda-beda. Akan tetapi disini penulis hanya menyebutkan sebagian dari beberapa tokoh saja.

Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Politik merupakan istilah yang digunakan untuk konsep pengaturan dalam masyarakat, yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan, agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, konsep ini mengandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan, hukum-hukum, dan cita-cita yang ingin dicapai.[1] Pada dasarnya ruang lingkup politik adalah negara, di mana negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat.[2]

---

[1] Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 35.

[2] Inu Kencana Syafi'e, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik menurut Deliar Noer seperti yang dikutip oleh Muin Salim adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuannya.[3] Kata Islam di sini berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, dalam arti sebagai ketundukan dan kepatuhan kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pegangan hidup bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.[4]

Secara teoritis politik Islam merupakan dimensi-dimensi ajaran Islam yang berhubungan dengan kegiatan politik atau diartikan hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami petunjuk-petunjuk Islam. Politik Islam pada dasarnya terkait dengan teori, praktik, landasan, dan nilai-nilai Islam. Kajian politik Islam merupakan upaya mempelajari perilaku politik seseorang, kelompok, atau umat Islam yang didorong dengan kesadaran keagamaan yang tinggi.[5]

Dalam perspektif historis, pada masa Nabi Muhammad SAW, sudah ada negara dan pemerintahan yang menggunakan sistem dan konsep Islam. Islam selalu berkaitan dengan aspek-aspek kenegaraan dan kemasyarakatan. Perspektif

---

[3] Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an,* 37.
[4] Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), 477.
[5] Abdul Aziz, *Politik Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat kita lihat pada waktu beliau mendiami tempat yang bernama Yatsrib, kemudian kata ini berganti nama menjadi Madinah. Ini merupakan negara dan pemerintahan pertama dalam catatan sejarah Islam yang menggunakan sistem dan konsep Islam yang pada akhirnya terbakukan dengan nama negara Madinah.[6]

Adanya cita-cita untuk menegakkan politik Islam, itu hal yang logis dan niscaya, dalam artian negara yang selalu menegakkan dan melaksanakan syariat Islam. Para penganut yang mendukung konsep ini menyebut negara Madinah. Pada masa inilah Nabi berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan dan sekaligus sebagai pemimpin umat Islam. Apabila diteorisasikan, konsep "negara" yang ada pada waktu itu dikatakan cukup unik, karena didalamnya mengandung unsur-unsur kenabian, keumatan, kenegaraan, administrasi pemerintahan, dan negara yang terdiri dari komunitas agama dan politik sekaligus.[7]

Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad, kepemimpinan dilanjutkan oleh khalifah Abu Bakar al-Shiddiq yang menggantikan kedudukan nabi sebagai pemimpin masyarakat atau negara.[8]

Munculnya gagasan tentang politik Islam adalah di era modern. Menurut Nurcholis Madjid, hal ini merupakan kecenderungan *apologetis* yang tumbuh dari dua jalur. *Pertama*, *apologi* untuk mengimbangi ideologi Barat, seperti

---

[6] A. Suyuti Pulung, *Fiqih Siyasah, Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 77.

[7] Aziz, *Politik Islam Politik,* 19.

[8] Deliar Noer, *Islam dan Politik* (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya. *Kedua*, untuk legalisasi dan formalisme yaitu apresiasi serba legalistic kepada Islam. Dalam gagasan ini Islam dipandang sebagai struktur dan kumpulan hukum. Oleh karena itu, kelompok yang mendukung adanya politik Islam untuk penerapan syari'at Islam menyatakan, bahwasannya agama dan negara mempunyai hubungan yang simbiosis. Agama memerlukan negara untuk bisa berkembang dan negara memerlukan agama sebagai landasan etika.[9]

Disini, penulis ingin mengaitkan politik Islam dengan Negara Islam. Yang dimaksud negara Islam di sini adalah negara yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam. Dengan ungkapan yang lebih tegas syari'at Islam dijadikan sebagai konstitusi (UUD) negara.

B. Dasar-dasar Politik Islam Dalam Penerapan Syari'at Islam

Pada dasarnya politik Islam itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah SWT semata. Kepala negara dan rakyat menjadi pembantu-pembantu Allah SWT dengan syarat mereka menjalankan ketentuan-ketentuan yang diperintah Allah SWT. Pemerintah dan rakyat tidak berhak membuat hukum atau menciptakan syariat. Oleh karena itu jalannya roda pemerintahan baik pemimpin atau rakyat itu harus mematuhi undang-undang yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengenai kepala negara disini dijelaskan, bahwasannya kepala negara selaku hamba Allah disamping harus bertanggungjawab kepada rakyat, ia

---

[9] Andi Wahyudi, *Muhammadiyah Dalam Gonjang Ganjing Politik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga harus bertanggungjawab kepada Allah SWT atas tindakannya baik mengenai dirinya atau pribadinya maupun mengenai masyarakatnya.[10]

Dalam sejarah, Islam digunakan sebagai sandaran negara yang bersifat theokratis. Artinya pemerintahan yang mengakui Tuhan sebagai penguasa mutlak dan dapat menerima wahyu-Nya sebagai dasar bangunan masyarakat atau negara.[11]

Menurut Banna, syari'at Islam harus dijadikan dasar gerak kemanusiaan yang luhur, dan syari'at Islam juga harus dijadikan dasar untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Di mana antara penguasa dan rakyat harus menjadikan hukum Tuhan dan hukum Rasul sebagai pijakan dan pedoman dalam segala urusan.[12] Sedangkan menurut Qutb, negara Islam itu merupakan negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.[13] Karena Islam adalah satu-satunya ideologi yang lebih sempurna, yang harus dijadikan landasan dalam kehidupan negara.[14]

Politik pada dasarnya tidak terlepas dari kekuasaan. Dalam kekuasaan itu sangat dibutuhkan dasar-dasar atau sistem yang dijadikan pondasi dalam sebuah pemerintahan, sehingga di atas pondasi itu pilar-pilar negara bisa ditegakkan.

---

[10] Sjechul Hadi Permono, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan* (Surabaya: CV. Aulia, 2004), 16.

[11] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 69.

[12] Yusuf Qardawi, *Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslimin* (Solo: Pustaka Mantiq, 1979), 105.

[13] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta: ERLANGGA, 2005), 44.

[14] Sayyid Qutb, *Fiqih Dakwah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1986),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa ajaran pokok agama Islam yang harus ditegakkan dalam membangun suatu masyarakat atau negara yang ideal, antara lain:

1. Persamaan dan Persaudaraan.

Pemerintahan dalam Islam berkewajiban untuk menyelenggarakan tatanan sosial yang berdasarkan persamaan, kesetaraan dan kesederajatan. Karena pada dasarnya manusia itu adalah sama, mempunyai hak yang sama dan diciptakan secara sederajat.[15]

Persamaan di sini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Hujurat:13

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*(QS. Al-Hujurat: 13).[16]

Tujuan penegakan persamaan dalam tata sosial Islam, diarahkan untuk penciptaan relasi sosial yang didasarkan pada sifat persaudaraan atau *ukhuwah.* Persaudaraan di sini merupakan sesuatu yang *inheren* dalam struktur sosial negara Islam. Oleh karenanya orang-orang yang percaya pada Islam, selayaknya mengidentifikasi diri ke dalam bagian dari persaudaraan universal yang tidak dibatasi wilayah.[17]

---

[15] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990), 6.
[16] *Al-Qur'an dan Terjemah*, 49 (Al-Hujurat):13.s
[17] Permono, *Islam dalam Lintasan Sejarah*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengertian Barat, Bangsa atau umat dibatasi oleh wilayah dalam letak geografis, iklim, ikatan darah, jenis bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan lain disebut nasionalisme yang diiringi fanatisme. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam, karena Islam sendiri adalah bangsa atau umat itu tidak dibatasi dengan letak geografis, daerah, bahasa, tapi diikat oleh akidah. Islam yang bersifat manusiawi dan internasional, umat yang berada dan hidup di negara manapun tetap dianggap sebagai rakyat (warga) negara Islam.[18]

Menurut Banna dan Qutb, nasionalisme harus ditentang. *Pertama*, karena nasionalisme mempunyai sikap eksklusif yang tidak kondusif bagi kemanusiaan secara luas. *Kedua*, orang-orang nasionalis mempunyai tujuan sekuler dengan hanya kemerdekaan dan kesejahteraan saja. Sedangkan yang diinginkan Banna dan Qutb adalah menuntun manusia seluruh dunia dengan jalan Islam. *Ketiga*, kaum nasionalis mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mengarah pada rasisme yang berbahaya. Bahwa suatu negara muslim tidak hanya memperhatikan nasibnya sendiri, tetapi juga nasib negara-negara lain yang punya warga negara muslim. Dengan demikian, di antara negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim dapat membentuk blok Islam.[19]

Jadi, tujuan nasionalisme yang sebenarnya adalah membebaskan negeri dari penjajahan dan membimbing manusia menuju cahaya Islam

---

[18] Idris Thaha, *Demokrasi Religius* (Jakarta: Teraju, 2005), 50.
[19] Amien Rais, *Cakrawala Islam* (Bandung: Mizan, 1987), 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengangkat bendera Islam setinggi-tingginya, hanya untuk memperoleh ridho Allah SWT.

2. Keadilan (*al-'adalah*)

Dalam negara atau masyarakat, keadilan harus ditegakkan dalam arti seluas-luasnya. Tidak hanya menyangkut keadilan hukum saja akan tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian negara harus memberantas setiap fenomena dan bentuk eksploitasi yang muncul di tengah-tengah masyarakat.[20]

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang pentingnya menegakkan suatu keadilan dalam semua bidang kehidupan. Allah berfirman dalam QS. Al-Nahl: 90.

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*(QS. An-Nahl: 90).[21]

Dalam QS. Al-Nisaa': 58 juga disebutkan:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila*

---

[20] Permono, *Islam dalam Lintasan*, 19.
[21] *Al-Qur'an dan Terjemah*, 16(An-Nahl): 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS. An-Nisa': 58).[22]

Hal ini juga ditegaskan oleh Banna, bahwa keadilan harus ditegakkan dalam negara, meskipun terhadap orang yang tidak beriman.[23] Menurut Banna, politik Islam dalam negeri maupun luar negeri benar-benar menjamin hak-hak non muslim, seperti hak berhubungan antar bangsa. Dalam firman Allah SWT yang artinya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berlaku adil". (QS. Al-Mumtahanah: 8).[24] Menurut Qutb, bahwasannya keadilan yang dikehendaki ajaran Islam adalah keadilan yang bersifat mutlak, tanpa dipengaruhi oleh kecintaan, kebencian, harta kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan.[25] Keadilan sosial dalam Islam adalah keadilan manusia dalam arti seutuhnya, tidak sekedar keadilan dalam arti ekonomi saja. Tetapi, keadilan yang mencakup segi kehidupan dan semua aspek kebebasan.[26]

---

[22] *Al-Qur'an dan Terjemah*, 4 (An-Nisa'): 58.
[23] Hasan Al-Banna, *Cahaya dari Balik Kabut* (Solo: Pustaka Mantiq, 1998), 68.
[24] Hasan Al-Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 269-270.
[25] Sayyid Qutb, *Islam dan Perdamaian Dunia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 97.
[26] Amien Rais, *Islam dan Pembaharuan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Musyawarah (*Syura*).

Syura adalah nilai-nilai dasar Islam yang harus digunakan dalam kehidupan seseorang, keluarga, masyarakat dalam menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Bahwasannya Islam telah menolak jenis negara yang otoritas, despotis, fasis bahkan totaliter. Karena sistem ini bisa membunuh hak politik rakyat yang didasarkan pada prinsip *syura* atau musyawarah, sehingga pemerintahan yang tidak melakukan musyawarah, dianggap bertentangan dengan Islam. Seperti, sistem monarki atau kerajaan yang berlaku, di mana sistem ini pengangkatannya melalui garis keturunan tidak melalui rakyat.[27]

Allah menegaskan dalam QS. Al- Imran: 159

....وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ....

Artinya: "....*Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*...."(QS. Al-Imran: 159).[28]

Demikian juga dalam QS. As-Shura: 38

وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ....

Artinya: "....*Sedang urusan (kaum muslimin) diputuskan dengan jalan musyawarah diantara kamu*...."(QS.As-Shura: 38).[29]

Ayat kedua di atas memberi kesimpulan, bahwasannya seluruh anggota masyarakat mempunyai hak kedaulatan yang sama sebagai mandataris kedaulatan Tuhan. Jadi segala urusan yang ada di pemerintahan

---

[27] Musthafa Thahhan, *Tantangan Politik Negara Islam* (Malang: Zamzami, 2003), 38.
[28] *Al-Qur'an dan Terjemah*, 3(Al-Imran):159.
[29] *Ibid*, 42 (As-Shura): 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kemasyarakatan itu harus dipecahkan dan dimusyawarahkan bersama-sama.[30]

Menurut Banna, bahwasannya politik Islam itu sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang yang berasaskan musyawarah. Karena Islam sendiri menyuruh umat manusia untuk melaksanakan musyawarah dalam semua masalah yang dihadapi.[31] Qutb juga menekankan, bahwa musyawarah merupakan bagian dari prinsip pemerintahan Islam. Di mana musyawarah ini harus dilakukan antara penguasa dan rakyat. Mengenai bentuk penyelenggaraan dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Dengan demikian, akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. [32]

4. Amanah.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 58:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا....

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya……".*(QS.An-Nisa': 58).[33]

Ayat ini ditujukan kepada para pemimpin umat, agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam seperti pembagian jarak dan penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan adil dan baik. Inilah yang dikehendaki oleh sebuah negara yang menghendaki

---

[30] Thahhan, *Tantangan Politik Negara Islam*, 38.
[31] Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah*, 271.
[32] Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 51.
[33] *Ibid*, h. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya penyelenggaraan yang didasarkan pada kejujuran yang berupa amanah. Dengan ini pula negara Islam disebut sebagai *"dar al-amanah"*. Dalam konsep syari'at Islam, negara dan kekayaannya, pemerintah beserta kekuasaannya merupakan amanat Allah yang diserahkan kaum muslimin untuk dikelola sebagaimana mestinya.[34]

5. *Amr bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil munkar.*

Dasar-dasar politik Islam pada hakikatnya merupakan jaminan untuk berlangsung secara sehat, dimana setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak bahkan mengatakan yang benar, dan yang ma'ruf, membela kebaikan dan mempertahankannya, dengan upaya sungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran, melarangnya dan menghukum kebatilan.[35]

Banna sangat menekankan, bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah keharusan bagi kaum muslimin untuk menegakkannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengontrol dan mengawasi pemerintah sejauh mana mereka melakukan kebenaran.[36] Adapun menurut Qutb, dalam Islam sendiri harus ada kekuasaan untuk memerintah dan melarang, melaksanakan seruan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Akan tetapi, Perintah dan larangan ini dapat dilakukan oleh orang yang hanya memiliki kekuasaan.[37]

---

[34] Thahhan, *Tantangan Politik Islam*, 40.
[35] Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1993), 106.
[36] Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah*, 260.
[37] Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, v. 2* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Biografi

1. Biografi Hasan al-Banna

a. Riwayat hidup

Hasan Al-Banna adalah pendiri dan pimpinan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, lahir di distrik Mahmudiyah, Mesir pada 17 Oktober 1906 bertepatan dengan 1323 H. Ia dibesarkan oleh keluarga yang terkenal dengan keilmuannya, pendidikannya, keagamaannya, kaya dan dihormati. Ayahnya Syekh Ahmad bin Abd. Al-Rahman bin Muhammad al-Banna al-Sa'ati. Ia adalah seorang muslim yang taat. Pada masa kanak-kanak ia dididik langsung oleh sang ayah yang selalu mendidik dan mengajarkan d Al-Qur'an, hadits, fiqih, bahasa dan ajaran tasawuf.[38]

Ketika usia dua belas tahun, Hasan al-Banna masuk Sekolah Dasar Negeri. Waktu itulah Hasan al-Banna masuk sebuah kelompok Islam "Himpunan Perilaku Moral". Himpunan ini mewajibkan kepada setiap anggotanya untuk mengikuti moralitas Islam dengan seksama dan menjatuhkan hukuman pada yang melanggar.

Bagi Hasan al-Banna yang paling berpengaruh dalam kehidupannya adalah tarekat sufi Hasafiah. Ia tertarik, karena tarekat ini berpegang teguh pada kitab suci dalam segala ritual dan upacaranya. Ikatan Banna dengan tarekat ini, membuatnya merasakan betapa penting hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya. Dalam memoar (catatan

[38] Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harian), ia menguraikan bagaimana cara seorang guru pertamanya mengajarkan padanya cara menilai ikatan spiritual dan emosi yang dapat tumbuh antara guru dengan murid. Berkat hubungan dengan sufi, ia senantiasa menghargai tasawuf, selama tidak mengandung bid'ah yang menurut sebagian orang mengotori praktek dan keyakinan sufi. Tarekat Hasafiyah ini, paling banyak mempengaruhi kehidupan Al-Banna.[39]

Pada usia empat belas tahun, ia dimasukkan ayahnya ke Sekolah Guru di Damanhur. Kegeniusannya mulai tampak di bangku sekolah ini. Ia selalu melampaui teman sekelasnya, karena disaat lulus ujian terakhir ia memegang rangking pertama. Pengetahuannya sangat luas, kemampuannya untuk menyelesaikan masalah sangat tajam dan mempunyai kecakapan khusus dalam memimpin teman-temannya di kelas.

Dengan motivasi ayahnya dalam menghafal al-Qur'an, sehingga di usia 14 tahun juga ia berhasil menghafal al-Qur'an. Di usia ke 16 tahun, ia melanjutkan studinya di sekolah tinggi Darul Ulum Kairo, Mesir. Di sini ia dikenal rajin, cerdas, tajam ingatan, dan mempunyai bakat jadi pemimpin. [40]

Di kota besar itulah ia dikenalkan dengan Rasyid Ridha beserta gerakan Salafiyahnya. Ia sangat rajin membaca majalah Al-Manar.

---

[39] Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam (Bandung*: Mizan, 1998), 129-130..

[40] Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Yang Berpengaruh Pada Abad 20* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui pembacaan itulah ia menyerap semangat pembaharuan Afghani dan Abduh. Masa itu, adalah masa kebangkitan Wahabi di Hijaz. Akan tetapi yang paling berpengaruh pada pembentukan pandangan Banna adalah karya-karya tulis Ridha tentang aspek-aspek politik, sosial, pembaharuan Islam, serta perlunya didirikan negara atau pemerintahan Islam dan diberlakukannya hukum Islam. Karena Islam dipandang sebagai agama yang sempurna dengan segala sistem yang dibutuhkan bagi kehidupan umat Islam.[41]

Ketika usia 25 tahun ia menamatkan studinya di Darul Ulum. Pada tahun 1927, diangkat kementrian pendidikan menjadi pengajar atau guru bahasa Arab untuk Sekolah Dasar di Isma'iliyah yang berlokasi dekat Terusan Suez, dan tempatnya tak jauh dari markas besar *Suez canal company*. Di sinilah Banna melihat adanya dominasi asing secara jelas. Manajer perusahaan, tentu orang Inggris tinggal di rumah dan kawasan mewah. Sementara orang-orang Mesir banyak yang tinggal di gubuk-gubuk menyedihkan.[42]

Tahun 1928 Al-Banna mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin di Isma'iliyah (Mesir).Yang bertujuan untuk menyebarkan moral, amal baik, dan mempromosikan Islam sebagai respon terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di dunia Islam, khususnya Timur Tengah,

---

[41] Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 147.
[42] Rahmena, *Para Perintis Zaman*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan makin luasnya dominasi imperialisme Barat. Ikhwanul Muslimin meluncurkan perjuangannya untuk melawan dominasi asing.[43] Ketika Menteri Pendidikan memindahkan Banna untuk mengajar di Kairo tahun 1932, organisasi ini pun juga ikut pindah ke Kairo. Dari sinilah Ikhwanul Muslimin menyebar ke seluruh Mesir dan menjadi organisasi nasional.

Pengaruh Ikhwanul Muslimun maupun misi publik, membawa Banna terlibat dalam politik nasional. Di tahun 1936 ini, ia menulis surat untuk raja, perdana menteri, dam penguasa Arab lainnya untuk mendorong mereka mempromosikan tatanan Islam. Dua tahun kemudian, Banna menyeru raja untuk membubarkan partai-partai politik di Mesir. Karena partai-partai itu dianggap melakukan korupsi dan berdampak memecah belah negara.[44]

Ikhwanul Muslimin memfokuskan kegiatan pada pembaharuan moral, sosial, dan condong menjadi organisasi politik melalui permusuhannya terhadap pendudukan Inggris. Di samping itu juga dukungannya kepada bangsa Palestina melawan zionisme. Ikhwanul Muslimun menganggap Palestina sebagai jantung dunia Arab pengikat orang-orang Islam. Sejak terjadi pemogokan umum dan pemberontakan

---

[43] Afadlal, dkk, *Islam dan Radikalisme DiIndonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 56.
[44] Rahmena, *Para Perintis Zaman*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan makin luasnya dominasi imperialisme Barat. Ikhwanul Muslimin meluncurkan perjuangannya untuk melawan dominasi asing.[43] Ketika Menteri Pendidikan memindahkan Banna untuk mengajar di Kairo tahun 1932, organisasi ini pun juga ikut pindah ke Kairo. Dari sinilah Ikhwanul Muslimin menyebar ke seluruh Mesir dan menjadi organisasi nasional.

Pengaruh Ikhwanul Muslimun maupun misi publik, membawa Banna terlibat dalam politik nasional. Di tahun 1936 ini, ia menulis surat untuk raja, perdana menteri, dan penguasa Arab lainnya untuk mendorong mereka mempromosikan tatanan Islam. Dua tahun kemudian, Banna menyeru raja untuk membubarkan partai-partai politik di Mesir. Karena partai-partai itu dianggap melakukan korupsi dan berdampak memecah belah negara.[44]

Ikhwanul Muslimin memfokuskan kegiatan pada pembaharuan moral, sosial, dan condong menjadi organisasi politik melalui permusuhannya terhadap pendudukan Inggris. Di samping itu juga dukungannya kepada bangsa Palestina melawan zionisme. Ikhwanul Muslimun menganggap Palestina sebagai jantung dunia Arab pengikat orang-orang Islam. Sejak terjadi pemogokan umum dan pemberontakan

---

[43] Afadlal, dkk, *Islam dan Radikalisme DiIndonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 56.
[44] Rahmena, *Para Perintis Zaman*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Palestina tahun 1936-1937, Ikhwanul Muslimun memberikan dukungan moral dan keuangan kepada bangsa Palestina. [45]

Pada tahun 1948, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam peperangan Palestina melawan Israel dengan semangat yang tinggi dan cita-cita untuk syahid. Oleh karena itu, pemerintah semakin khawatir dengan keterlibatan Ikhwanul Muslimin. Pada akhir tahun ini Perdana Menteri Mesir Fahmi Nuqrashi Pasha, mengeluarkan keputusan tentang pembubaran organisasi Ikhwanul Muslimin. Kemudian pemerintah menyita kekayaan organisasi itu dan menangkap sebagian besar anggotanya, kecuali Al-Banna.[46] Dengan peristiwa yang dilakukan pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin itu, tiga minggu kemudian anggota Ikhwan muda membunuh perdana menteri Nuqrashi Pasha.[47]

Dengan terbunuhnya Nuqrashi di tangan anggota Ikhwan, pemerintah ingin membalas dendam terhadap Ikhwanul Muslimin, sehingga pemerintah mengutus lima orang dari staf intelejen rahasia untuk membunuh Banna. Mereka berhasil membunuhnya di Kairo, depan kantor pusat pemuda Ikhwanul Muslimin (*Dar Asy-Syubban al-Muslimin*) pada tanggal 12 Februari 1949 M/1368 H. Banna terluka parah, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi pihak pemerintah mengeluarkan perintah yang sangat keras agar pihak rumah

---

[45] Mortimer, *Islam dan Kekuasaan* (Bandung: Mizan, 1984), 237.
[46] Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna* (Jakarta: Harakah, 2002), 15.
[47] Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakit membiarkan mengucurkan darah sampai mati. Akhirnya Banna menyerahkan ruhnya keharibaan sang penciptanya dalam keadaan suci.[48]

b. Karya-karya tulis

Meskipun Hassan al-Banna meninggal dunia, akan tetapi ia banyak meninggalkan karya-karya yang dihasilkan sewaktu hidupnya. Karya-karyanya terkenal di dunia Islam sampai sekarang. Diantara karya-karya tulis yang ditinggalkan adalah:

1) *Ahaditsul jum'ah* (Pesan Setiap Jum'at)
2) *Mudzakkiratud Dakwah wad-Da'iah* (Memoar atau Catatan Harian Buat Dakwah dan Da'i)
3) *Al-Ma'tsurat* (Do'a-Do'a)

Karya-karyanya dalam bentuk kumpulan pesan (Majmu'atur Rasail) adalah:

1) *Da'watuna* (Dakwah Kita)
2) *Nahwa Nur* (Menuju Kecerahan)
3) *Ila Asy-Syabab* (Kepada Para Pemuda)
4) *Bainal Amsi wal Yaum* (Antara Kemarin Dan Hari ini)
5) *Risalatul jihad* (Pesan Jihad)
6) *Risalatut Ta'alim* (Pesan-Pesan Pendidikan)
7) *Al-Mu'tamar al-Khamis* (Konferensi Kelima)
8) *Nizhamul Usar* (Sistem Kelompok-Kelompok Keluarga)

---

[48]Yakan, *Revolusi Hasan Al-Bann*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) *Al-'Aqaid* (Akidah)

10) *Nizhamul Hukm* (Sistem Pemerintahan)

11) *Al-Ikhwan Tahta rayatil Qur'an* (Ikhwan Di bawah Bendera Al-Qur'an)

12) *Da'watuna fi Thaurin Jadid* (Dakwah Kita Dalam Masa Baru)

13) *Ila ayyi Syai'in Nad'un Nas* (Ke arah Mana Kita Menyeru Manusia)

14) *An-Nizham al-Iqtishadi* (Sistem Perekonomian).[49]

2. Biografi Sayyid Qutb

a. Riwayat hidup

Sayyid bin Qutb bin Ibrahim, lahir di sebuah perkampungan Musyah dekat kota Asyut Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906 M. Ia anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Al-hajj Qutb bin Ibrahim, anggota Al-Hizbu Al-Wathani (Partai Nasionalis). Ketika Qutb lahir, keadaan ekonomi keluarga sedang menurun. Namun keluarga ini tetap berwibawa dengan status ayahnya yang berpendidikan. [50]

Semenjak kecil ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menitikberatkan pada ajaran Islam dan mencintai Al-Qur'an. Dengan kecerdasannya, ketika sebelum berumur sepuluh, ia sudah hafal Al-Qur'an. Dengan menyadari bakat anaknya, orang tuanya memindahkan keluarganya ke Hilwan sebuah daerah yang berada di pinggiran Kairo.

---

[49] *Ibid*, 13.

[50] Didin Syaefuddin, *Pemikiran Post Modern Islam* (Jakarta: Grasindo, 2003), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1929 Qutb memperoleh kesempatan masuk kuliah di sekolah persiapan Tajhiziah Darul Ulum sebuah universitas yang berada di Kairo. Universitas ini sangat terkenal dalam bidang pengkajian ilmu-ilmu Islam dan sastra Arab. Tempat ini adalah tempat Hasan Al-Banna belajar sebelumnya. Di tahun 1933 Qutb memperoleh gelar sarjana muda pendidikan di Darul Ulum Kairo. Ketika masa-masa kuliah, Qutb ditinggal wafat ayahnya. Pada tahun 1941, Ibunya juga wafat. Dengan kewafatan dua orang yang sangat dicintainya itu, membuat Qutb merasa sedih dan kesepian. Akan tetapi, di sisi lain keadaan ini justru memberikan pengaruh positif dalam pikirannya.[51]

Setelah lulus, Qutb telah memulai kariernya sebagai guru sekolah, sama juga seperti Hasan Al-Banna. Kemudian ia diangkat menjadi penilik atau pengawas pada kementrian pendidikan. Ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan. [52]

Hasil studi dan pengalamannya selama di Amerika Serikat itu memberikan dan meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh faham materialisme yang gersang akan faham ketuhanan. Ketika kembali ke Mesir, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari faham

---

[51] Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an, v. I* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 406.
[52] Saefuddin, *Pemikiran Modern*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materialisme sehingga terlepas dari cengkraman materi yang tidak pernah terpuaskan.[53]

Kembalinya Qutb ke Mesir tahun 1950 bertepatan dengan berkembangnya krisis politik Mesir yang kemudian menyebabkan terjadinya revolusi Juli 1952. Sejak revolusi itu, Qutb mempunyai hubungan kerjasama dengan tokoh-tokoh revolusioner. Mereka minta pendapat Qutb dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan masa depan revolusi. Ketika itu, Qutb belum bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Namun pemikiran dan kecenderungan Qutb terhadap Islam sudah mulai nampak.[54]

Dengan bergabungnya Qutb dalam Ikhwanul Muslimin, ketika itu situasi sosial politik Mesir masih dalam masa transisi antara sistem monarchi dan sistem pemerintahan republik. Dalam Ikhwanul Muslimin, ia mulai terkenal sebagai "Pemikir Islam" yang berorientasi pada ideologi Islam, menggantikan kedudukan Hasan Al-Banna.[55]

Atas tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah masa Presiden Gamal Abdul Nasser dan tuduhan memimpin aparat-aparat teroris yang diam-diam merencanakan pembunuhan terhadap Nasser dan sejumlah bintang-bintang film dan penyanyi Mesir baik laki-laki maupun perempuan, Qutb ditahan.[56] Pengadilan memvonis hukuman lima belas

---

[53] Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, 406.
[54] Imam Ghazali Said, *Islam Kaum Fundamentalis* (Surabaya: DIANTAMA, 2003), 187.
[55] Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis*, 190.
[56] Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun penjara. Akan tetapi, dalam pertengahan tahun 1964, Qutb dibebaskan dari penjara atas permintaan presiden Irak, Abd Al-Salam Arif yang mengadakan kunjungan ke Mesir.[57]

Satu tahun setelah pelepasan dirinya dari penjara, para penguasa Mesir menemukan rencana Ikhwan melawan pemerintah, sehingga lagi-lagi pemerintah melakukan penangkapan secara besar-besaran terhadap anggota Ikhwan. Sayyid Qutb ditangkap kembali dan divonis hukuman mati pada akhir tahun 1965 dan dieksekusi bersama-sama anggota Ikhwan yang lain pada hari Senin 13 Jumadil Awal 1386/ 29 Agustus 1966, sehingga Qutb menyambut panggilan rabbnya dalam tiang gantungan.[58]

b. Karya-karyanya

Banyak buku-buku yang dihasilkan oleh Sayyid Qutb. Meskipun waktu itu, ia berada dalam tahanan, akan tetapi ia masih menulis. Qutb menulis lebih dari dua puluh buku, yang terdiri dari cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra, serta artikel untuk majalah.

Di awal karier penulisannya, Qutb menulis dua buku mengenai keindahan dalam al-Qur'an: *at-Tashwir al Fanni fil Qur'an* "Konsep Seni dalam Al-Qur'an" dan *Masyaahidal al-Qiyamah fil Qur'an* "Menyaksikan atau Pentas Qiyamat dalam Al-Qur'an". Kemudian selanjutnya telah menerbitkan karya monumentalnya antara lain: *al-'Adaalah al-Ijtimaa'iyah fil Islam* "Keadilan sosial dalam Islam", kemudian disusul

[57] Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 148.
[58] David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme* (Yogyakarta: LKIS, 1997), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *fi Zhilahil Qur'an* "di bawah naungan al-Qur'an" dan *Ma'alim fith-Thariq* "Rambu-Rambu jalan" Kedua buku ini ditulis selama berada dalam penjara. Dengan tujuan mengajak umat manusia membangun masyarakat dengan tauhid yang bersumber dan berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.[59]

Selain karya-karya di atas, masih banyak karya-karya yang lain dari hasil pikirannya dan kejeniusannya, antara lain:

1) *As-Salaam al-'Alami wal Islam* (Perdamaian Internasional dan Islam)
2) *An-Naqd al-Adabii Usuluhuu wa Maanaahijuhuu* (Kritik, Prinsip-Prinsip Dasar, dan Metode Sastra)
3) *Ma'rakah al-Islaam war-Ra'sumaaliyah* (Perbenturan Islam dan Kapitalisme)
4) *Fit tariikh, Fikrah wa manaahij* (Dalam Sejarah: Teori dan Metode)
5) *Al-Mustaqbal li haadzad-Diin* (Di Tangan Agama Ini)
6) *Nahw mujtama' Islaami* (Menuju Masyarakat Islam)
7) *Ma'rakatuna ma'al Yaahuud* (Perbenturan Kita Dengan Yahudi)
8) *Al-Islam wa Musykilah al-Hadharah* (Islam dan Problem-Problem Kebudayaan)
9) *Hadza ad-Din* (Agama Ini)
10) *Khashais at-Tashawwur al-Islaami wa Muqawwamatuhu* (Ciri dan Nilai Visi Islam).[60]

---

[59] Herry Mohammad, dkk., *Tokoh-tokoh yang Berpengaruh pada Abad 20*, 299.
[60] Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an, V.1*, 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA DAN SAYYID QUTB TENTANG PENERAPAN SYARI'AT ISLAM

A. Pandangan Hasan Al-Banna Tentang Penerapan Syariat Islam

Ketika masa hidup Banna, negara Mesir dalam situasi yang menganut sistem kerajaan, kepala negara ditentukan melalui garis keturunan. Menurut Islam, sistem ini tidak berdasarkan Islam. Karena Islam yang ideal itu, sistem pemerintahannya harus berdasarkan dengan *bay'ah* dan *syura.*[1] Menurut Banna, bahwa sistem ini menyimpang dari cita-cita Islam yang sebenarnya. Ketika itu juga, Banna melihat bentuk pengaruh modernisasi sekuler Barat terhadap kehidupan Islam serta kelemahan pemerintahan yang kurang tanggap dalam menghadapi kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat Mesir.

Dengan melihat kondisi ini, Banna menegaskan tentang sifat politik Islam, guna menegakkan dan melaksanakan syari'at Islam.[2] Dengan keinginannya untuk menerapkan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat, Banna tidak mempunyai niat melakukan kudeta atau tidak ingin mengubah bentuk pemerintahan yang ada, ia hanya ingin menjadikan syari' Islam menjadi hukum negara. Untuk mencapai tujuan, Banna ikut mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Keikutsertaan Banna dalam pemilu tahun 1942 ini, merupakan jawaban atas kebutuhan praktis pergerakan, dan perubahan, demi kepentingan dakwah.[3]

---

[1] Hasan Hanafi, *Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2008), 134.
[2] John L. Esposito, *Dinamika Kebangunan Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), 11.
[3] Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna* (Jakarta: UI-Press, 1990), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran tentang penerapan syari'at Islam ini, menjadi tujuan agenda gerakannya. Dalam pandangan Banna, apapun bentuk negara baik republik atau kerajaan, harus didirikan atas dasar-dasar Islam yang kuat dan benar. Ada beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan negara, yaitu tanggung jawab penguasa terhadap kekuasaannya, persatuan masyarakat, dan sikap tanggap terhadap keinginan masyarakat.[4].

Islam mewajibkan pemerintah untuk bekerja demi kemaslahatan rakyat dengan membenarkan kebenaran dan menggugurkan kebatilan, dan diharuskan semua rakyat untuk mentaati pemerintah, selama pemerintah menjalankan kewajibannya. Apabila pemerintah itu menyimpang dari kebenaran, maka rakyat mempunyai kewajiban untuk meluruskannya, agar kembali pada kebenaran dan berkomitmen pada undang-undang Islam yang bersumber pada hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah.[5]

Islam dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang luhur, yang menyeru manusia untuk mengakui adanya Tuhan, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, serta memikirkan dan memperhatikan alam sekitarnya. Menurut Banna, Islam merupakan *nizam* yang harus dijadikan dasar untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dan negara.[6]

Negara merupakan instrumen kekuasaan untuk menegakkan syariat Allah dan menegakkan etika Islam yang universal. Karena hubungan antara negara dan

---

[4] Fathi Osman, *Ikhwan dan Demokrasi* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2005), 15.
[5] Hasan Al-Banna, *Kumpulan Risalah Dakwah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 257-258.
[6] Hasan Al-Banna, *Cahaya dari Balik Kabut* (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat bersifat teodemokratik.[7] Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus negara (*din wa dawlah*) yang memiliki konsep sosial dan politik.

Pada dasarnya pemikiran dan gerakan Banna dalam penerapan syari'at Islam banyak mengacu pada aliran moderat, dengan menekankan tentang urgensitas peran agama di dalam proses perubahan. Dari sinilah, Banna menemukan dan menawarkan berbagai metode pembaharuan atau model gerak sosial menuju perubahan. Meskipun pada intinya Banna ingin menegakkan politik Islam dengan menjalankan syari'at dengan cara merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ia menggagas tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk dijadikan landasan, menuju sistem ideal demi terwujudnya suatu perubahan.

1. Melakukan reformasi diri (*Ishlah).*

   Langkah ini menjadi syarat pertama yang harus dilakukan seseorang ketika melakukan perubahan. Dengan memperbaiki diri pribadi, dirinya dapat mempunyai fisik yang kuat, berakhlak mulia, berintelektual, mampu berusaha dan beraqidah lurus dan benar dalam beribadah. Banna meyakini, bahwa sesungguhnya perubahan dan perbaikan itu harus dimulai dari diri, dan agama Islam dijadikan sebagai faktor yang efektif.[8] Dalam QS. Ar-Ra'd: 9 Allah berfirman:

---

[7] Abdurrahman Mas'ud, *Negara Bangsa Versus Negara Syariah* (Yogyakarta: Gema Media, 2006), 19.

[8] Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna,* 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"* (QS. Ar-Rad: 11).[9]

2. Perubahan atau *ishlah* dalam membentuk keluarga Islami.

Langkah ini merupakan lanjutan langkah pertama. Ketika seseorang dapat memperbaiki diri pribadinya, maka seharusnya dapat membentuk keluarga yang Islami. Tahap kedua ini bertujuan membentuk dan membawa keluarga untuk tetap berpegang pada pemikiran dan etika Islam di dalam setiap prilaku kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam rumah tangga harus benar-benar dikembangkan kehidupan yang Islami, mulai dari pemikiran hingga tindakan yang dilakukan sehari-hari.[10] Adanya perbaikan pada individu, akan memberi pengaruh pada keluarga. Maka terbentuklah keluarga yang ideal sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Islam.[11]

3. Perubahan *(ishlah)* pada masyarakat.

Perbaikan masyarakat ini harus mencakup pada tingkatan masyarakat secara keseluruhan. Tahap ini merupakan suatu pengembangan misi kebaikan dan memerangi kemungkaran. Banna menegaskan, bahwa tidaklah sempurna keislaman seseorang yang mengabaikan kondisi umat yang rusak dengan

---

[9] Al-Qur'an dan Terjemah, 13 (Al-Ra'd): 11.
[10] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta: ERLANGGA,2005), 37.
[11] Yusuf Qordhawi, *70 tahun Ikhwanul Muslimin* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyibukkan diri dengan ibadah. Karena hakikat Islam adalah jihad, kerja keras, agama dan negara. Jihad dalam hal ini adalah jihad untuk merubah masyarakat yang rusak menuju masyarakat yang lebih baik.[12] Baik buruknya masyarakat akan membawa pengaruh besar pada perkembangan negara.

Menurut Banna, ketika seseorang dapat melakukan perubahan pada dirinya, keluarganya, hingga masyarakat, maka seseorang itu akan dapat menegakkan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pergerakan yang dilakukan Banna merupakan suatu pergerakan atas dasar dakwah, yang mempunyai tujuan-tujuan yang tidak terikat, mulai dari pembinaan (*tarbiyah*), penyadaran pada individu, hingga tegaknya syari'at Islam. Dalam menyebarkan dakwahnya, Banna bersifat membangun dan menghimpun, tidak menghancurkan, tidak memecah belah, dan tidak menyukai kekerasan.[13]

Jadi, ketika seseorang dapat melakukan perubahan pada dirinya, keluarganya, hingga masyarakat, maka seseorang itu akan dapat menegakkan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Konsep Politik Islam dalam Pandangan Sayyid Qutb

Zionisme dan salibisme-imperialisme adalah kelompok yang sangat membenci gerakan Islam dan ingin menghancurkan Islam. Rencana-rencana ini

---

[12] Rahmat, *Arus Baru Islam*, 36.
[13] Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyibukkan diri dengan ibadah. Karena hakikat Islam adalah jihad, kerja keras, agama dan negara. Jihad dalam hal ini adalah jihad untuk merubah masyarakat yang rusak menuju masyarakat yang lebih baik.[12] Baik buruknya masyarakat akan membawa pengaruh besar pada perkembangan negara.

Menurut Banna, ketika seseorang dapat melakukan perubahan pada dirinya, keluarganya, hingga masyarakat, maka seseorang itu akan dapat menegakkan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pergerakan yang dilakukan Banna merupakan suatu pergerakan atas dasar dakwah, yang mempunyai tujuan-tujuan yang tidak terikat, mulai dari pembinaan (*tarbiyah*), penyadaran pada individu, hingga tegaknya syari'at Islam. Dalam menyebarkan dakwahnya, Banna bersifat membangun dan menghimpun, tidak menghancurkan, tidak memecah belah, dan tidak menyukai kekerasan.[13]

Jadi, ketika seseorang dapat melakukan perubahan pada dirinya, keluarganya, hingga masyarakat, maka seseorang itu akan dapat menegakkan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Pandangan Sayyid Qutb Tentang Penerapan Syariat Islam

Zionisme dan salibisme-imperialisme adalah kelompok yang sangat membenci gerakan Islam dan ingin menghancurkan Islam. Rencana-rencana ini

---

[12] Rahmat, *Arus Baru Islam*, 36.
[13] Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan melalui buku-buku, tekad dan tipu dayanya untuk menyebarkan ideologi-ideologi ateis, dengan tujuan melemahkan aqidah Islamiyah, menghapuskan akhlak-akhlak umat Islam [14]

Menurut Qutb, bahwasannya kesuksesan material menjadi landasan kekuatan Barat. Hal itu mengakibatkan adanya perilaku moral tercela, dan membuat konsepsi masyarakat menopang dengan tidak berakar, berjiwa dan kehampaan. Dengan masalah ini, Qutb menemukan dan memberi solusi bahwa untuk memulihkan kembali masyarakat ke semula, maka harus kembali pada Tuhan dan Islam. Setelah menemukan solusi ini, Qutb memusatkan energi untuk mengeksplorasi dan menganjurkan cara untuk memulihkan nilai-nilai umat yang harmonis.[15]

Mengenai implikasi, visi politik Qutb yang pertama adalah menciptakan keserasian *Ilahiah* di dunia. Artinya kehidupan di dunia itu harus didasarkan pada hukum-hukum *Ilahi*. Kedua, berpolitik berarti menangkap pengetahuan tentang kebenaran mutlak. Dengan demikian akan tercipta kembali umat yang mantap, menentramkan hati dan bermoral.

Kepatuhan kepada syari'at Allah, bagi Qutb merupakan syarat terwujudnya keselarasan sempurna antara kehidupan manusia dan kehidupan alam semesta. Dengan demikian, perlu ada keselarasan antara hukum alam dan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Karena itu, politik haruslah berupaya

---

[14] Sayyid Qutb, *Mengapa Saya dihukum Mati* (Bandung: Mizan, 1996), 34.
[15] Ali Rahmena, *Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga umat, dan untuk menjaga umat diperlukan manusia yang mempunyai keselarasan dengan kehendak Tuhan.[16]

Ide-idenya itu mencerminkan kekecewaan terhadap ketidaksanggupan pemerintah nasionalis untuk menghasilkan perbaikan dalam lingkungan sosial, politik dan ekonomi Mesir. Pemikiran politik Qutb lebih banyak berkisar pada upayanya untuk mengetengahkan sistem dan tatanan Islam sebagai alternatif ideologi bagi Mesir. Bahkan Qutb menawarkan Islam sebagai jalan alternatif dari komunisme, kapitalisme, liberalisme dan sekularisme yang disebut sebagai Jahiliyah. [17]

Qutb juga disebut sebagai orang yang menyempurnakan bangunan dasar, perpanjangan serta perkembangan dari pemikiran yang diletakkan oleh Hasan Al-Banna. Akan tetapi Qutb menganut garis revolusioner dan cenderung tidak sabar dengan metode pentahapan yang digagas Banna. Qutb mengembangkan pemikirannya ke kutub ekstrim, pro kekerasan, radikal dan eksklusif, bahkan Qutb menyerukan bahwa pedang adalah suatu jalan dalam menggunakan kekuatan, kekerasan untuk melakukan revolusi terhadap seluruh sistem dan pemerintahan yang berdiri sendiri tanpa supremasi Islam, baik disebuah negeri maupun dunia internasional.[18]

---

[16] Rahmena, *Para Perintis Zaman*, 166-167.
[17] Rahmat, *Arus Baru Islam*, 42.
[18] *Ibid*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa konsep politik Qutb yang harus dijadikan landasan, demi terwujudnya suatu negara atau pemerintahan yang ideal. Diantaranya konsep *hakimiyah*, *manhaj*, dan negara Islam.

1. Hakimiyah

Bagi Qutb, istilah *hakimiyah* menunjukkan keilahian, yang berarti kedaulatan asal, segala kedaulatan adalah milik Tuhan. Ini semua merupakan bentuk revolusi terhadap kedaulatan manusia dari setiap rupa atau bentuk apa saja, baik dari para imam, kepala suku, pangeran, gubernur, raja dan lain-lain. Konsep ini bertujuan sepenuhnya untuk merombak konsep yang sebelumnya tidak mengakui pada kedaulatan Tuhan.

Jadi, perhambaan total manusia harus semata-mata pada Tuhan. Ini berarti, bahwa kaum muslimin harus bekerja dalam batas-batas wahyu Tuhan.[19]

Tuhan merupakan sumber kekuasaan, dimana Tuhan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur segala sesuatu tentang makhluk-Nya. Maka semua yang berhubungan dengan kekuasaan, baik kekuasaan yang menyangkut ekonomi maupun politik, harus disandarkan pada kehendak dan ketentuan Tuhan. Seperti, dalam pengangkatan atau pemberhentian seorang penguasa, dan bagaimana mengelola sebuah kekuasaan, itu harus benar-benar disandarkan pada Tuhan, kepada kitab suci Al-Qur'an.

---

[19] Esposito, *Kebangunan Islam*, 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Manhaj**

Manhaj di sini diartikan sebagai metode dan penetapan perjuangan yang bersumber dari pengalaman sejarah nabi. Pengalaman masyarakat Islam di Mekkah dan Madinah memberikan pedoman pada seluruh umat Islam untuk perjuangan masa kini dan masa mendatang. Sehingga perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah *suri tauladan* yang patut di contoh oleh umat Islam.[20]

Manhaj Islam di sini ada tiga tahap, *Pertama* tahap dibentuknya jama'ah. Membentuk jama'ah ini sebagai penyatuan orang-orang untuk menjadi sel organis penting bagi kaum muslim dan bersedia mengabdikan diri untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sejati. Jama'ah ini merupakan inti dinamik proses pengislaman yang didasarkan pada pengutamaan risalah.

Kedua, ketika jama'ah dituntut karena keyakinannya. Al-Qur'an memusatkan pada pemeliharaan ideologis jama'ah dengan memberikan kepastian akan dukungan Ilahi dan kekuatan dalam perjuangan terhadap penindasan masyarakat jahili. Maka eksistensi jama'ah adalah sebagai barisan depan kaum muslimin dengan rasa tanggung jawabnya bersedia memisahkan diri dari pikatan-pikatan masyarakat jahili. Jadi disini disebutkan bahwa di seluruh dunia ini ada dua pihak, pihak Tuhan dan pihak setan. Pihak Tuhan berdiri di bawah panji Tuhan, sedangkan pihak setan mencakup setiap

20 Rahmat, *Arus Baru Islam*, 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas, kelompok, bangsa, ras dan individu yang tidak berdiri di bawah panji-panji Tuhan.[21]

Ketiga ialah hijrah, sebagai upaya pemisahan secara sadar dari sistem Jahili. Tahap ini menjadi suatu periode untuk integrasi jama'ah menjadi kesatuan organis yang bersifat saling mendukung, dan persaudaraan. Berdasarkan sejarah Islam, peristiwa pindahnya Nabi dan para pengikutnya dari Mekkah ke Madinah tahun 622 M disebut sebagai acuan hijrah, yang bertujuan melenyapkan sistem Jahili di Mekkah dan sekitarnya. Tahap *ketiga* ini, merupakan tahap kemenangan dan konsolidasi tenaga.[22] Seperti, dalam penaklukan kota Mekkah, yang dilakukan kaum muslim. Atas pertolongan dan kehendak Tuhan, sehingga kemenangan ada di pihak kaum Muslimin, dan dikembalikan kota suci itu pada Islam.[23]

Pembebasan kota Mekkah ini memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan beragama dan politik. Rasulullah berhasil menghancurkan berhala-hala yang terdapat di sekitar Ka'bah dan menghilangkan patung-patung yang ada di dalamnya. Masuknya kota Mekkah ke dalam wilayah kekuasaan Islam memperbesar wibawa Rasul di kalangan suku-suku yang selama ini masih mempertahankan kepercayaan dan adat istiadat yang bertentangan dengan aqidah Islam. Keberhasilan tersebut mengundang masyarakat umum untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah.

---

21 Esposito, *Kebangunan Islam*, 98-99.
22 Rahmat, *Arus Baru Islam*, 46.
23 Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, v.5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kemenangan dan keberhasilan itu mengantar mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam.[24]

3. Negara Islam

Negara Islam di sini diartikan sebagai suatu negara yang sistem pemerintahannya benar-benar bersumber pada syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Menurut Qutb, Islam harus memerintah, karena Islam adalah satu-satunya ideologi konstruktif dan positif yang lebih sempurna. Selain itu negara Islam berprinsip bahwa semua orang muslim harus berperan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah kenegaraan.[25]

Al-Qur'an merupakan kitab suci dakwah yang memiliki ruh pembangkit, berfungsi sebagai penguat, penjaga, penerang dan penjelas bagi kehidupan. Al-Qur'an diturunkan untuk melakukan perombakan terhadap umat manusia secara totalitas.[26]

Menurut Qutb, politik pemerintahan dalam Islam didasarkan atas tiga asas yakni, keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. *Pertama*, keadilan penguasa yang kebijakannya tidak terpengaruh oleh perasaan senang atau benci, suka atau tidak suka, hubungan kerabat, dan suku. Dalam negara Islam setiap individu harus menikmati

---

[24] Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, vol.10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 383-384.
[25] Rahmat, *Arus Baru Islam*, 47.
[26] Sayyid Qutb, *Fiqih Dakwah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadilan yang sama, tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan atas keturunan dan kekayaan.

Kedua, ketaatan rakyat, suatu keharusan dan kewajiban taat kepada pemegang kekuasaan. Ini, merupakan perpanjangan kewajiban taat kepada Allah dan rasul-Nya. Dalam sisi lain dijelaskan, tidak ada kewajiban ketaatan rakyat kepada penguasa, apabila para pemegang kekuasaan telah menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan oleh syari'at, maka gugurlah kewajiban taat kepada penguasa dan segala perintahnya tidak harus dilaksanakan.

Ketiga, tentang musyawarah antara penguasa dan rakyat.[27] Permusyawaratan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Sedangkan teknik pelaksanaannya tidak secara khusus ditetapkan. Dengan demikian, bentuk penyelenggaraan dan pelaksanaannya terserah kepada kepentingan dan kebutuhan.[28]

Sebuah negara yang diatur menurut hukum Islam secara teknis disebut *dar al-Islam* (negeri yang damai). Negara selalu menjunjung tinggi keunggulan hukum Islam, dan ciri khas masyarakat ini selalu memakai sistem musyawarah dalam mencapai mufakat.[29]

---

[27] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990), 150-151.
[28] Sayyid Qutb, *Islam dan Perdamaian Dunia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984), 94.
[29] Mumtaz Ahmad, *Teori Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Penerapan Syariat Islam Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb

Pemikiran politik Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb mempunyai persamaan dan perbedaan. Substansi pemikiran politik dua tokoh ini mempunyai agenda akhir yang sama, yakni menjadikan syari'at Islam sebagai hukum dalam negara. Dengan demikian, hukum-hukum Allah dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam mewujudkan gagasan di atas, Banna dan Qutb punya kecenderungan dan cara sendiri-sendiri. Banna menganut aliran moderat, dengan lebih banyak meletakkan dasar-dasar dakwah, berupa pembinaan dan penyadaran. Banna juga menggagas tahapan-tahapan yang harus ditempuh, demi terwujudnya perubahan. Tahapan tersebut diantaranya *pertama, ishlah* dalam diri sendiri. *Kedua*, membentuk keluarga Islami. *Ketiga, ishlah* dalam masyarakat.

Menurut Banna apabila seseorang dapat merubah dirinya, keluarganya dan masyarakat secara baik, maka ia akan dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa menerapkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan, Banna mencalonkan diri untuk ikut menjadi anggota parlemen pada pemilu tahun 1942. Keikutsertaan Banna dalam pemilu ini, dengan tujuan melakukan perubahan terhadap sistem yang berlaku dalam pemerintahan. Pada mulanya Qutb berperan sebagai perpanjangan dari pemikiran Banna, tetapi pada akhirnya ia cenderung tidak sabar dengan metode dan tahapan yang digagas Banna. Qutb lebih cenderung bersikap dan bertindak radikal hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas ekstrim irasional, pro kekerasan, dan eksklusif. Untuk mencapai tujuan menegakkan politik Islam dengan menerapakan syari'at Islam, Qutb lebih percaya kepada tindakan spontan dan radikal terhadap pemerintah yang ada, dengan lebih senang beraksi secara langsung, dan unsur-unsur militannya menjadi lebih menonjol. Karena itu, ia tak pernah ikut dalam pemilu yang pernah terjadi di Mesir.

D. Pengaruh Pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb Terhadap Dunia Islam

Banna dan Qutb adalah pemikir Islam yang sangat terkenal di dunia Islam, dua tokoh ini termasuk dalam gerakan revivalisme Islam (kebangkitan Islam). Gerakan ini hampir terjadi di seluruh dunia Islam, khususnya Timur Tengah pada abad ke-20 M. Pemikiran Banna dan Qutb juga mempunyai pengaruh terhadap organisasi Islam Ikhwanul Muslimin, sehingga dua tokoh ini menjadi kekuatan oposisi utama terhadap pemerintah di Mesir yang penguasanya silih berganti.

Bergabungnya Banna dan Qutb dalam Ikhwanul Muslimin membawa pengaruh dalam perkembangannya. Selain berkembang di Mesir, Ikhwanul Muslimin juga berkembang di luar Mesir seperti Syiria, Palestina, Yordania, Yaman, Sudan dan lain-lain.[30]

Adanya gerakan ini, kepercayaan masyarakat luas pada Islam dapat dihidupkan kembali baik misinya maupun peradabannya, serta menyingkirkan

[30] Rahmat, *Arus Baru*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serbuan budaya dari Barat. Sebagian umat percaya pada dasar-dasar Islam, sehingga Islam dijadikan sebagai dakwah dalam negara, ibadah dan kepemimpinan, sholat dan jihad.[31]

Pemikiran Banna dan Qutb dijadikan landasan, pegangan serta pelajaran oleh para pemikir Islam lainnya dalam menerapkan sebuah sistem Islami di negaranya masing-masing. Ikhwanul Muslimin juga memberi pengaruh terhadap gerakan dakwah kampus yang meliputi nilai-nilai dan doktrin yang dikembangkannya. Seperti halnya di Indonesia banyak organisasi kampus yang mengatasnamakan gerakan dakwah Islam. Seperti, KAMMI dan HTI yang memformulisasikan dan menyuarakan adanya sebuah penerapan syari'at Islam dalam negara.[32]

Bahkan ide-ide itu juga telah masuk dalam wilayah politik dalam partai yang ada di Indonesia. Seperti halnya PKS yang mengatasnamakan partai Islam, dan ingin menjadikan syariat Islam sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Ketika menghadapi pemilu 2004, PKS memperoleh suara yang melambung dan memuaskan. Dukungan masyarakat terhadap Islamisme cenderung menaik sehingga membuktikan bahwa Islamisme memang benar-benar meningkat.[33]

---

[31] Qordhawi, *70 tahun Ikhwanul Muslimin*, 183-184.

32 Ali Said Damanik, Fenomena Partai Keadilan (Jakarta: Teraju, 2002), 109.

33 Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA DAN SAYYID QUTB TENTANG PENERAPAN SYARI'AT ISLAM

A. Penerapan Syariat Islam Dalam Pandangan Hasan Al-Banna

Melihat kondisi masyarakat Mesir yang menganut sistem monarchi atau kerajaan, Banna ingin menegakkan politik Islam dengan menjalankan syari'at Islam. Ia ingin menjadikan Islam sebagai hukum yang diterapkan dalam kehidupan negara.[1] Pada dasarnya agama Islam ini ditegakkan atas dasar keadilan, meskipun terhadap orang yang tidak beriman, mengandung undang-undang Ilahi yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.[2] Gagasan syari'at Islam menjadi tujuan atau agenda utama dalam gerakannya. Dengan pandangan, suatu negara apapun bentuknya harus didirikan atas dasar syari'at Islam, Sehingga terwujud suatu negara yang ideal.[3]

Dalam mencapai tujuannya itu, Banna tidak menyatakan sikapnya secara terbuka dan tidak mempunyai niat untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang ada, karena Banna tidak menyukai tindak kekerasan, sehingga benar-benar dapat menjamin kekuatannya. Banna menganut aliran moderat, dengan tidak melakukan konfrontasi dengan negara.[4]

---

[1] Fathi Osman, *Ikhwan dan Demokrasi* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2005), 35.
[2] Hasan Al-Banna, *Cahaya dari Balik Kabut* (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), 68.
[3] Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 137.
[4] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta: ERLANGGA, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banna menggagas tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk dijadikan landasan, demi terwujudnya perubahan. Tahapan-tahapan yang digagas Banna ini, disebut sebagai metode *tadarruj*. Antara lain:

1. *Ishlah* dalam diri sendiri.

   Perubahan yang dimulai dalam diri merupakan proses dan syarat pertama yang harus dilakukan seseorang. Sehingga dalam firman Allah SWT ditegaskan, yang artinya "sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, sehingga ia dapat merubah dirinya sendiri".[5] Ayat ini dapat diambil kesimpulan, bahwasannya ketika ada suatu masalah besar yang menimpa suatu bangsa atau kaum, maka sebagai seorang yang berakal harus selalu berfikir dan melakukan intropeksi terhadap dirinya dengan tidak selalu menyalahkan pada Tuhan Pencipta alam.

2. *Ishlah* dalam membentuk keluarga.

   Ketika seseorang dapat mengubah dan memperbaiki dirinya, maka orang itu hendaknya dapat membentuk keluarga yang Islami, yang selalu tetap berpegang teguh pada etika-etika Islam dan syari'at Islam. Adanya perbaikan pada individu, maka secara tidak langsung akan memberi pengaruh yang positif pada keluarga.[6] Oleh karena itu dengan adanya keluarga atau rumah tangga yang baik, maka kemungkinan besar akan memberi pengaruh yang baik pada kehidupan masyarakat yang ada di sekelilingnya.

---

[5] Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna* (Jakarta: UI-Press, 1990), 30.
[6] Rahmat, *Arus Baru Islam*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ishlah* pada masyarakat.

Tahap ini merupakan suatu pengembangan misi kebaikan dan memerangi kejahatan dan kemungkaran.[7] *Ishlah* ini dilakukan dalam masyarakat secara keseluruhan, sehingga menjadikan cara hidup masyarakat menjadi hidup yang baik.[8] Tujuan ini semua adalah memasukkan kecintaan Islam ke dalam jiwa dan *ghirah* terhadap Islam, mempersiapkan jalan untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan, dan menjaga kepentingan agama.[9]

Islam menganjurkan pada seluruh umat manusia untuk memberantas dan memerangi kemungkaran yang ada di bumi. Dalam hadits Rasulullah disebutkan yang artinya: "Barang siapa diantara kamu sekalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya, apabila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman".(HR. Muslim).

B. Penerapan Syariat Islam Dalam Pandangan Sayyid Qutb

Mengenai visi politik Qutb yang penting adalah menciptakan keserasian Ilahiah di dunia. Artinya kehidupan di dunia harus didasarkan pada keserasian hukum-hukum Ilahi. [10] Qutb mempunyai tiga konsep politik yang harus dijadikan landasan demi terwujudnya suatu negara atau pemerintahan yang ideal.

---

[7] Rahmat, *Arus Baru Islam*, 37.
[8] Yakan, Revolusi Hasan Al-Banna, 30.
[9] *Ibid*, 33.
[10] Rahmena, *Para Perintis Zaman*, 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konsep *hakimiyah*

Konsep *hakimiyah* ini berarti menunjukkan keilahian yang berarti kedaulatan asal. Tuhan merupakan sumber kekuatan yang penuh untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk-Nya. Maka semua yang berhubungan dengan kekuasaan baik yang menyangkut masalah ekonomi, sosial, dan politik harus disandarkan pada Tuhan. Seperti halnya dalam pengangkatan dan pemberhentian seorang penguasa, dan bagaimana harus mengelola sebuah kekuasaan itu harus benar-benar disandarkan pada Tuhan dengan merujuk pada kitab suci-Nya yakni Al-Qur'an. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan manusia itu harus semata-mata kepada Tuhan.

Pada dasarnya masyarakat Islam hanya dapat dibangun menurut ajaran-ajaran syari'at, karena syari'at dapat menjamin kemerdekaan dan keadilan bagi semua orang beriman. Syari'at di sini tidak terbatas pada perintah-perintah, hukum, dan prinsip-prinsip pemerintahan saja, akan tetapi juga menyangkut moralitas iman, pokok-pokok moralitas atau perilaku manusia, dan pokok-pokok pengetahuan.[11]

2. *Manhaj*

Konsep manhaj di sini merupakan sebuah metode dan penetapan perjuangan yang merujuk pada perjuangan dan pengalaman Nabi. Segala tindakan dan perjuangan nabi bukan hal kebetulan, akan tetapi merupakan sebuah pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat. Nabi Muhammad adalah

[11] John L. Esposito, *Dinamika Kebangunan Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang nabi dan rasul Allah yang menjadi suri tauladan (*uswatul hasanah*) bagi umat Islam. Sehingga, pengalaman dan perjuangan yang dilakukan nabi di Mekkah dan Madinah, dapat dijadikan tauladan untuk perjuangan masa kini san mendatang.[12]

Islam maupun isi keyakinannya tidak hanya untuk mengubah adanya persepsi dan komitmen ideologi. Akan tetapi juga harus memberi saran-saran untuk membentuk bangsa yang baik (pengikut) Tuhan di dunia.[13]

3. Negara Islam

Negara Islam adalah suatu negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan syari'at Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Islam merupakan satu-satunya ideologi positif dan lebih sempurna dibandingkan yang lain.[14] Hukum Al-Qur'an harus dijadikan landasan bagi berlangsungnya kehidupan dalam negara. Al-Qur'an diturunkan untuk melakukan perombakan dan perubahan terhadap umat manusia secara totalitas. Karena Al-Qur'an mengandung undang-undang atau konsep-konsep secara global, memiliki ruh pembangkit, dan berfungsi sebagai penguat, penjaga dan penjelas.[15]

Adanya pemikiran Banna dan Qutb tentang syari'at Islam, banyak para pemikir Islam mengambil nilai-nilai untuk diperjuangkan dalam negara.

---

[12] Rahmat, *Arus Baru Islam*, 45.
[13] Esposito, *Kebangunan Islam*, 102.
[14] Rahmat, *Arus Baru Islam*, 47.
[15] Sayyid Qutb, *Fiqih Dakwah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1986), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan pemikirannya mempengaruhi pada organisasi kampus, Seperti adanya KAMMI dan HTI yang dengan semangatnya memperjuangkan syari'at Islam.[16] Selain organisasi ini, gerakan atau kelompok Jama'ah Salafi, dan Front Pemuda Islam juga sangat mendukung adanya penerapan syari'at Islam, dengan maksud syari'at Islam diformalkan menjadi sumber perundangan di Indonesia.[17]

Bahkan ide-ide ini juga diperjuangkan dalam partai politik di Indonesia seperti PKS (partai keadilan sejahtera) yang mengatasnamakan partai Islam dan ingin menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Sehingga pada pemilu tahun 2004, PKS mendapat suara yang memuaskan.[18]

Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2009 yang baru dilaksanakan bulan April yang lalu, suara PKS juga melambung besar dan meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal ini, dapat dibuktikan bahwa banyak orang-orang atau berbagai kelompok yang benar-benar menginginkan adanya syari'at Islam untuk ditegakkan dalam kehidupan negara, bahkan ditegakkan untuk kemaslahatan umat. Selain PKS, PPP (partai persatuan pembangunan) dan PBB (partai bulan bintang) merupakan partai yang berasaskan Islam yang sama-sama ingin menegakkan syari'at Islam di Indonesia.

---

[16] Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan* (Jakarta: Teraju, 2002), 109.
[17] Afadlal, dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI PRESS, 2005), 153.
[18] Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Banna dan Qutb Tentang Penerapan Syari'at Islam

Pada dasarnya Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb, sama-sama memperjuangkan politik Islam, dimana seluruh tatanan dalam negara harus berdasarkan syari'at Islam. Dua tokoh ini ingin menjadikan hukum Islam menjadi hukum dalam sebuah negara. Sehingga hukum-hukum Allah dapat ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi untuk mencapai gagasan ideal itu, masing-masing memiliki strategi atau cara sendiri-sendiri demi tercapainya tujuan. Adakalanya Hasan Al-Banna dalam mencapai tujuannya itu lebih bersikap moderat dengan tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap pemerintahan yang ada. Karena Al-Banna mempunyai komitmen dengan tidak menyukai pada kekerasan. Untuk melakukan perubahan, Banna menggagas beberapa metode berupa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan perubahan *(ishlah)* diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Banna menegaskan, apabila seseorang itu dapat melakukan tiga tahapan ini, maka seseorang itu akan dapat menegakkan syari'at Islam dalam negaranya.

Sayyid Qutb dalam mencapai tujuannya, lebih bersifat radikal, ekstrim, pro-kekerasan, yang tidak sabar dengan sistem pentahapan yang dilakukan oleh Banna. Oleh karena itu, Sayyid Qutb mempunyai cita-cita melakukan kudeta (revolusi) terhadap pemerintah yang ada, dan lebih percaya pada tindakan yang langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi yang berjudul "Perbandingan Pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb Tentang Penerapan Syariat Islam" yang terdiri dari beberapa bab, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Perlu diketahui, bahwa ruang lingkup politik adalah negara. Politik diartikan sebagai suatu konsep pengaturan dalam masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana pemerintahan dapat dijalankan, agar terwujud sebuah masyarakat atau negara yang paling baik.

   Politik Islam merupakan dimensi-dimensi ajaran Islam yang berhubungan dengan kegiatan politik dan mengatur hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami petunjuk-petunjuk Islam didasarkan kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah. Politik Islam pada dasarnya terkait dengan teori, praktek, landasan, nilai-nilai Islam. Kajian politik Islam ini adalah sebagai upaya mempelajari perilaku politik seseorang, kelompok, dan umat Islam yang didorong dengan kesadaran keagamaan yang sangat tinggi.

2. Mengenai pemikiran Hasan Al-Banna adalah berkisar pada upayanya menegakkan politik Islam dengan tujuan untuk menerapkan syari'at Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ingin menjadikan Islam sebagai hukum negara. Untuk mencapai tujuannya, Banna mempunyai metode tahapan, demi terwujudnya perubahan. Yakni, *ishlah* pada diri sendiri, i*shlah* pada keluarga, dan *ishlah* dalam masyarakat. Pemikiran Sayyid Qutb sama halnya dengan Al-Banna, yaitu menegakkan politik Islam dengan menjalankan syari'at Islam. Di mana Syari'at Islam harus dijadikan sebagai hukum dalam negara.

Disini Qutb menawarkan beberapa konsep untuk menuju sebuah negara ideal. Di mana konsep-konsep ini harus dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam segi kehidupan. *Pertama*, konsep *hakimiyah*, yang artinya kedaulatan asal atau kedaulatan Tuhan sepenuhnya. *Kedua, manhaj*, sebuah metode dan penetapan perjuangan yang bersumber dari pengalaman sejarah Nabi Muhammad SAW. *Ketiga*, negara Islam, yang diartikan sebagai suatu negara yang sistem pemerintahannya benar-benar bersumber pada syari'at Islam.

3. Bahwa pemikiran Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb ini terdapat sisi persamaan dan perbedaan. Dua tokoh ini mempunyai substansi pemikiran dan agenda akhir yang sama, yakni menjadikan syari'at Islam sebagai hukum negara.

   Dalam mewujudkan gagasannya itu, Banna dan Qutb punya kecenderungan dan cara sendiri-sendiri. Banna cenderung bersikap moderat, dengan tidak menyukai terhadap kekerasan. Untuk mencapai tujuan, Banna ikut mencalonkan diri menjadi anggota parlemen dalam pemilu tahun 1942 di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mesir, dengan tujuan melakukan perubahan terhadap pemerintahan. Sayyid Qutb lebih cenderung bersikap dan bertindak radikal hingga pro-kekerasan. Untuk mencapai tujuan dalam menegakkan syari'at Islam, Qutb lebih percaya pada tindakan spontan terhadap pemerintah yang ada. Karena itu, ia tak pernah ikut dalam pemilu yang pernah terjadi di Mesir.

B. Saran-saran

Segala sesuatu yang dihasilkan oleh Barat, seperti halnya demokrasi atau sistem sekuler Barat oleh banyak pihak dianggap merupakan sistem terbaik sepanjang sejarah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb sebagai tokoh Islam yang fundamental terhadap pemikirannya sangat menolak terhadap sistem sekuler atau demokrasi, karena hal ini merupakan sebuah sistem yang dihasilkan oleh Barat yang sangat bertentangan dengan ajaran dan syari'at Islam.

Setelah melakukan analisa terhadap pemikiran tentang penerapan syariat Islam yang digagas Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb, maka ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran:

1. Agaknya sosok Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb memiliki pemikiran-pemikiran yang cemerlang serta pengorbanan terhadap apa yang dicita-citakan, perlu dijadikan sebuah teladan bagi siapapun dalam upaya menjunjung dan menegakkan syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dengan kelompok Islam yang lain, jangan sampai terjadi konflik yang bisa merugikan umat Islam. Sudah menjadi hal yang wajar dan biasa, apabila antara kelompok yang satu dengan yang lain mempunyai keyakinan dan pemahaman yang berbeda-beda.
3. Dalam skripsi ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu hendaknya mahasiswa yang akan melakukan penelitian kembali tentang penerapan syari'at Islam Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb dapat menyempurnakannya kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian* Sejarah. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2007.

Afadlal, dkk. *Islam dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.

Ahmad, Mumtaz. *Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.

Aziz, Abdul. *Politik Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Al-Banna, Hasan. *Cahaya dari Balik* Kabut. Solo: Pustaka Mantiq, 1992.

_____. *Kumpulan Risalah Dakwah*. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Damanik, Ali Said. *Fenomena Partai Keadilan*.Jakarta: Teraju, 2002.

Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: CV Anda Utama, 1992.

_____. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sari Agung, 1988.

Esposito, John L. *Dinamika Kebangunan Islam*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Hanafi, Hasan. *Fundamentalisme* Islam. Yogyakarta: Islamika, 2003.

Herry Mohammad, dkk. *Tokoh-Tokoh Yang Berpengaruh Pada Abad 20*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Jahroni, Jajang. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Marbur, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Mas'ud, Abdurrahman. *Negara Bangsa Versus Negara Syariah*. Yogyakarta: Gema Media, 2006.

Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mortimer. *Islam dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan, 1984.

Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Noer, Deliar. *Islam dan Politik*. Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.

Osman, Fathi. *Ikhwan dan Demokrasi*.Yogyakarta: Titian Wacana, 2005.

Permono, Sjechul Hadi. *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*. Surabaya: CV. Aulia, 2004.

Pulung, A. Suyuti. *Fiqih Siyasah, Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Qardhawi, Yusuf. *Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslimin*. Solo: Pustaka Mantiq, 1979.

_____. *70 tahun Ikhwanul* Muslimin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Qutb, Sayyid. *Fiqih Dakwah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1986.

_____. *Islam dan Perdamaian Dunia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

_____. *Mengapa Saya dihukum* Mati. Bandung: Mizan, 1996.

_____. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an,v.1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

_____. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, v.* 2. Jakarta: Gema Insani, 2001.

_____, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an, vol. 10*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal*. Jakarta: ERLANGGA, 2005.

Rahmena, Ali. *Perintis Zaman Baru* Islam.Bandung: Mizan, 1995.

Rais, Amien,. *Cakrawala* Islam. Bandung: Mizan, 1987.

_____. *Islam dan Pembaharuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Sagiv, David. *Islam Otentisitas Liberalisme*.Yogyakarta: LKIS, 1997.

Said, Imam Ghazali. *Ideologi Kaum Fundamentalis*. Surabaya: DIANTAMA, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salim, Abdul Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, v.5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI-Press, 1990.

Syaefuddin, Didin. *Pemikiran Post Modern Islam*. Jakarta: Grasindo, 2003.

Syafi'e, Inu Kencana. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Thaha, Idris. *Demokrasi Religius*. Jakarta: Teraju, 2005.

Thahhan, Musthafa. *Tantangan Politik Negara Islam*. Malang: Zamzami, 2003.

Wahyudi, Andi. *Muhammadiyah Dalam Gonjang Ganjing Politik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

Wibowo, Eddi. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: YPPI, 2004

Yakan, Fathi. *Revolusi Hasan Al-Banna*. Jakarta: Harakah, 2002.

Zainuddin. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Pensil, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN AMPEL
FAKULTAS ADAB SURABAYA

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa: ROFIATUL ANA — Jurusan: SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM

Nomor Induk Mhsw: A02206009 — Pembimbing: Drs. Imam Ghozali Said, MA.

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
21-4-009	Proposal Revisi proposal	
10-6-009	Setor Naskah bab I & II Revisi bab I & II	
23-6-09	Setor bab III & IV Perbaikan	
29-6-09	Perbaikan ~~ok~~ arah isi kesesuaian isi dan judul	
5-7-09	Perbaikan bahasa yang bukan standart	
11-7-09	Konsistensi istilah Politik Islam dan Negara Islam	
13-7-09	Arahan untuk menyesuaikan rumusan masalah dg. kesim- pulan	
	Perbaikan kesimpulan	
16-7-09	Arahan untuk melengkapi daftar pustaka	
16-7-09	Acc untuk diuji	

JUDUL SKRIPSI "PERBANDINGAN PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA DAN SAYYID QUTB TENTANG PENERAPAN SYARI'AT ISLAM".

Surabaya, 16-7-2009

DOSEN PEMBIMBING,

NIP 150 292 675

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIODATA

Nama	: Rofiatul Ana
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat tanggal lahir	: Lamongan, 10 Desember 1986
Alamat	: Jl Masjid Al-Azhar, RT. 04 RW.01, Ds. Gedangan, Kec. Maduran, Kab. Lamongan, Jawa Timur.
No. HP	: 085645959315
Fakultas / Jurusan	: Adab / Sejarah dan Peradaban Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya.
NIM	: A0 2205009
Pengalaman Organisasi	: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
Status	: Belum Menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id